

WRT

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 199/DIKTI/Kep/1996

tentang

PENYELENGGARAAN PROGRAM EKSTENSI
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa program ekstensi di Perguruan Tinggi Negeri dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas belajar di luar waktu penyelenggaraan program reguler;
- b. bahwa penyelenggaraan program ekstensi dapat memberikan kesempatan bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk memperoleh tambahan dana dan masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan program ekstensi perlu diatur dengan cermat agar tidak merugikan, tetapi justru dapat membantu kelancaran penyelenggaraan program reguler, serta dapat terwujudnya kesinambungan/peningkatan sarana dalam proses pembelajaran;
- d. bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri perlu mengarahkan dalam pengontrolan penyaluran dana program ekstensi;
- e. bahwa untuk hal-hal tersebut dalam butir a sampai dengan e, perlu ditetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan program ekstensi Perguruan Tinggi Negeri;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Ekstensi di Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor ... thun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,:
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0343/U/1994;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1241/D/T/19'

Memperhatikan : Rancangan Hasil Rapat Kerja Teknis Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Akademik dan Koordinator Kopertis bulan Januari 1996.

M E M U T U S . . A X

Menetapkan : KETENTUAN MENGENAI PENYELLENGGARAAN PROGRAM EKSTENSI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 1 :

- (1) Program Ekstensi adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri bersama-sama dengan program reguler yang telah memperoleh izin dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan program reguler, dan mahasiswa yang diterima secara khusus dalam program tersebut.
- (2) Unit Pelaksana Program Ekstensi adalah satuan yang ditugaskan oleh Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan program bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 2 :

- (1) Penyelenggaraan Program Ekstensi dapat dilakukan apabila telah mendapat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang berupa Surat Keputusan.
- (2) Ijin penyelenggaraan program ekstensi hanya dapat diberikan dalam bidang-bidang studi tertentu kepada perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan program reguler.

Pasal 3

- (1) yang dapat diterima sebagai mahasiswa Program Ekstensi adalah lulusan SLTA Y atas dasar tahun kelulusannya tidak diperkenankan lagi mengikuti UMPTN
- (2) jumlah penerimaan mahasiswa Program Ekstensi setiap tahun pada suatu prog studi, tidak diperkenankan melebihi jumlah kapasitas penerimaan mahasi program reguler.

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Ekstensi tidak boleh mengurangi peluang pengembangan kapasitas dan kesempatan belajar maupun mutu penyelenggaraan serta kesinambungan peningkatan sarana dan proses pembelajaran Program reguler.

Pasal 5

Mutu lulusan pendidikan Program Ekstensi tidak boleh lebih rendah dari program reguler yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang sama atau lebih baik dari penyelenggaraan proses pembelajaran program reguler.

Pasal 6

Perencanaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan Program Ekstensi serta pengalokasianya harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk Daftar Urutan Rencana Kegiatan (DURK) dan Laporan Keuangan Tahun yang disusun oleh Ketua Polaksana Program melalui dan disetujui oleh Rektor.

Pasal 7

Raporsi penggunaan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan Program Ekstensi dia sebagai berikut :

a. Biaya operasional (yang meliputi : biaya operasional, honorarium dosen/teknisi administrasi, bahan habis pakai , dll), maksimum 50 %;

b. Biaya promosi dan kerja sama minimum 10 %

c. " perlengkapan " ~ 10 %

d. Biaya PT ~ 10 %

e. Biaya utilita max 20 %

Pasal 8

Rektor menetapkan penggunaan dana dan penanggung jawab masing-masing ak
tersebut pada Pasal 7.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih la
dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 10

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perba
kebagaimana mostinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jun 1990

